



## Faktor-Faktor Internal terhadap Pencegahan Fraud di BUMDES dengan Variabel Moral *Sensitivity* sebagai Moderasi

### *Internal Factors on Fraud Prevention in BUMDES with Moral Sensitivity as a Moderating Variable*

Aditya Nugroho<sup>1\*</sup>, Muhammad Fahmi<sup>2</sup>, Juanda Astarani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Tanjungpura, Ekonomi dan Bisnis, Indonesia

Email: [\\*1aditya270986@gmail.com](mailto:*1aditya270986@gmail.com)

#### Article Info

Article history:

Received: 08 Februari 2024

Accepted: 09 Juli 2024

Published: 10 Juli 2024

Keywords: *HR competency; whistleblowing; financial reporting compliance; internal control system; fraud prevention; moral sensitivity*

DOI: 10.37859/jae.v14i1.6769

JEL Classification:

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM, whistleblowing, ketaatan pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan BUMDES di Kecamatan Sungai Raya dengan moral sensitivity sebagai variabel moderasi. Metode penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kuesioner. Sampel sebanyak 85 responden yang dipilih menggunakan simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sementara whistleblowing tidak memiliki pengaruh yang positif. Ketaatan pelaporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan pencegahan fraud, sedangkan sistem pengendalian internal tidak memiliki hubungan yang signifikan. Selain itu, moral sensitivity tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi SDM, whistleblowing, ketaatan pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelola BUMDES.

*This research aims to analyze the influence of HR competency, whistleblowing, compliance with financial reporting, and internal control systems on fraud prevention in village-owned enterprises (BUMDES) management in Sungai Raya District, with moral sensitivity as the moderating variable. The research method used primary data and secondary data obtained through questionnaires. A sample of 85 respondents was selected using simple random sampling. The research results show that HR competency has a significant influence on fraud prevention, while whistleblowing does not have positive influence. Financial reporting compliance has a strong and significant connection with fraud prevention, while the internal control system does not have a significant connection. Apart from that, moral sensitivity is unable to moderate the influence of HR competency, whistleblowing, compliance with financial reporting, and internal control systems on fraud prevention by village-owned enterprises (BUMDES) managers.*

## PENDAHULUAN

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengelola potensi di desa (Budiono, 2015; Fitriska, 2017), meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pradnyani, 2019), dan membangun sistem perekonomian digital. BUMDes harus mengikuti peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berperan sebagai organisasi sosial dan entitas komersial (Wijanarko, 2012). Prinsip efisiensi, efektivitas, dan persatuan menjadi landasan dalam organisasi (Iskandar et al., 2021), tidak terkecuali pengelolaan BUMDes. Pemberdayaan desa harus mempertimbangkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, kearifan lokal, dan budaya yang ada (Krisiandi, 2020). Pemerintah daerah dan desa perlu mengidentifikasi karakteristik desa untuk meningkatkan pengelolaan potensi produk desa. Pengelolaan BUMDes harus profesional, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan penanganan masalah kelembagaan sebagai salah satu tantangan yang perlu diatasi.

Penyelenggaraan BUMDes rentan terhadap tindakan curang seperti penyalahgunaan aset dan penyajian laporan keuangan palsu, yang dianggap sebagai penipuan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kecurangan dalam pengelolaan BUMDes menjadi isu utama dalam penyaluran dana desa. Korupsi di tingkat desa juga menjadi masalah serius dengan kasus korupsi di sektor desa menjadi yang paling sering dituntut oleh aparat penegak hukum. Pada tahun 2022, terjadi 151 kasus korupsi di sektor desa dengan 252 tersangka dan kerugian negara. Contohnya, pada tahun 2023, terungkap kasus korupsi BUMDes di Karangasem Bali yang melibatkan bendahara BUMDes dan dilaporkan ke kepolisian setempat.

Di Kalimantan Barat, terdapat kasus korupsi terkait dana desa. Polda Kalbar mengungkap kasus tindak pidana korupsi dana hibah yang dialokasikan ke 48 desa di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017. Kejaksaan Tinggi Kalbar juga menemukan kasus korupsi terkait alokasi dana desa pada tahun 2021. Di Kabupaten Landak, pengelolaan BUMDes juga menghadapi ancaman kasus penyelewengan dana desa. Di Kabupaten Kubu Raya, dana desa sebesar Rp. 116.299.461.000 dialokasikan ke 118 desa yang mengelola 107 BUMDes. Kecamatan Sungai Raya merupakan kecamatan dengan jumlah BUMDes terbanyak. Pemerintah kabupaten Kubu Raya menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Non Tunai (CMS) untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Namun, masih ditemukan potensi kecurangan, seperti dugaan korupsi ADD dan DD tahun 2016 di Desa Sungai Bulan dan kasus korupsi ADD dan APBDes tahun 2022 di dua kecamatan Kubu Raya.

Fraud harus diidentifikasi dan dideteksi secara efektif untuk mengetahui pelakunya dan alasan di baliknya. Pencegahan dan pendeteksian fraud harus dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi. Lingkungan yang tidak memungkinkan kecurangan harus diciptakan. Penemuan penipuan dengan cepat akan mencegah kerugian lebih lanjut (Priantara, 2013). Penelitian ini fokus pada pencegahan fraud dalam pengelolaan BUMDes sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi desa. Pengembangan BUMDes menghadapi tantangan, termasuk kecurangan yang merugikan masyarakat desa. Diperlukan langkah-langkah seperti partisipasi masyarakat desa, SDM yang kompeten, whistleblowing, kepatuhan dalam pelaporan keuangan, dan pengendalian internal untuk meminimalkan penyelewengan dana BUMDes.

Pencegahan kecurangan merupakan langkah penting dalam memerangi fraud. Dengan melakukan pencegahan secara dini, kita dapat mengendalikan pelaku potensial, mempersempit ruang gerak mereka, dan mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi (Karyono, 2003). Terdapat lima tujuan yang digunakan untuk mencegah penipuan secara efektif: pencegahan, penangkalan, gangguan, identifikasi, dan tindakan hukum. Dr. Steve Albrecht (Priantara, 2013) menyatakan bahwa untuk mencapai hal ini, penting untuk memperbaiki tata kelola dan pengendalian internal. Perbaikan ini meliputi penerapan pengendalian yang efektif, pencegahan kolusi, memastikan kepatuhan pihak ketiga, memantau perilaku pegawai, menciptakan sistem

pelaporan atau pengaduan fraud, memberlakukan sanksi yang tegas, dan melakukan audit fraud secara proaktif.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan pencegahan diperlukan untuk meminimalkan penyelewengan dan kecurangan. Kepala desa dan perangkat desa, termasuk pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang memiliki keterbatasan kompetensi, dapat meningkatkan potensi kecurangan dalam pengelolaan dana (Laksmi & Sujana, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) menjadi komponen penting dalam mencegah penipuan. Untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial masyarakat desa, diperlukan profesionalisme dan keahlian dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Pelatihan dan bimbingan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola BUMDes (Laksmi & Sujana, 2019).

Faktor penting dalam pencegahan kegiatan penipuan adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Kemampuan, pengetahuan, dan perilaku individu dalam melaksanakan tugas profesional secara efektif merupakan faktor penentu efektivitas sistem dan proses kerja. Tingkat kompetensi yang tinggi sangat penting dalam mengatasi masalah ini, seperti yang terlihat dalam penelitian di BUMDes Rempak Maju Jaya di Kabupaten Siak (Jaya & Rafi, 2018; Widyawati et al., 2019) Selain, sistem pelaporan whistleblowing juga merupakan fasilitas penting dalam pencegahan fraud, di mana pegawai atau pihak terkait dapat melaporkan tindakan yang salah secara independen dan rahasia tanpa takut adanya tindakan balasan. Laporan langsung dari pegawai menjadi sumber informasi kunci dalam mendeteksi dan mencegah fraud.

Tingkat kepatuhan pelaporan keuangan juga berperan dalam mencegah penipuan. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik memiliki korelasi positif dengan tingkat kepatuhan perangkat desa terhadap laporan keuangan (Munti & Fahlevi, 2017). Akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan desa, di mana aparat desa bertanggung jawab atas tugas, wewenang, dan kewajiban mereka, termasuk memberikan informasi keuangan desa yang terbuka dan adil (Oktaviani et al., 2017)

Tantangan umum yang dihadapi oleh BUMDes termasuk kurangnya kepatuhan terhadap protokol pelaporan keuangan dan keterbatasan SDM di tingkat desa. Praktik penunjukan dan pemilihan pengurus BUMDes berdasarkan rekomendasi pribadi dari desa seringkali menyebabkan pengurus merangkap jabatan atau melakukan pekerjaan di luar tanggung jawab BUMDes mereka (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022). Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan sangat penting dalam mencegah penipuan. Konsistensi dalam pelaporan juga dapat mencegah kecurangan dan memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Biduri et al., 2022). Laporan keuangan BUMDes harus sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2021 dan Kepmendesa nomor 136 tahun 2022 agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Sistem pengendalian internal memainkan peran penting dalam mencegah penipuan dan merupakan langkah pertama (Tuanakotta, 2010). Karena dengan ini, evaluasi yang diperlukan menjadi lebih efektif. Kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian internal digunakan untuk memastikan kinerja yang baik dan kepatuhan hukum (Widyawati et al., 2019). Namun, moralitas individu juga menjadi faktor penting yang dapat menyebabkan kecurangan. Meskipun moralitas yang tinggi dapat mengurangi keinginan untuk melakukan kecurangan, masih ditemukan kasus penyelewengan dalam pengelolaan BUMDes karena kurangnya penerapan perilaku jujur dan kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, perilaku pimpinan atau staf yang tidak sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecurangan (Wonar et al., 2018).

Sensitivitas moral terkait dengan pemahaman bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi orang lain. Moralitas melibatkan pemahaman tentang konsekuensi tindakan, empati, dan peran individu dalam situasi tertentu. Keberhasilan sebuah organisasi tergantung pada keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral dari semua manajer. Untuk mencegah

kecurangan, penting bagi SDM yang kompeten, mekanisme whistleblowing, kepatuhan pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal untuk bekerja bersama-sama.

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan dan korupsi merupakan upaya yang penting dalam menekan faktor-faktor penyebab kecurangan (Laksmi & Sujana, 2019). Dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, kurangnya kompetensi kepala desa, perangkat desa, dan pengelola BUMDes menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes melalui bimbingan, pelatihan, dan peningkatan pengetahuan dalam bidang tersebut (Laksmi & Sujana, 2019).

Penelitian sebelumnya tentang pencegahan kecurangan telah menemukan hubungan yang berbeda antara faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM), mekanisme whistleblowing, dan sistem pengendalian internal memiliki hubungan positif dan signifikan dengan pencegahan kecurangan (Widyawati et al., 2019). Namun, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa kemungkinan terhindarnya kecurangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kompetensi SDM (Adhivinna et al., 2022; Hayati & Amalia, 2021). Dalam hal pengelolaan keuangan desa, kepekaan moral dan sistem pengendalian internal telah ditemukan memiliki dampak positif terhadap pencegahan penipuan (Armelia & Wahyuni, 2020).

Melihat perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan masih tingginya kasus penyelewengan dalam pengelolaan BUMDes, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi SDM, whistleblowing, ketaatan pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan variabel moderasi yaitu moral sensitivity.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory untuk menguji hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Dilakukan di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, penelitian ini fokus pada BUMDes di wilayah tersebut, dengan pelaksanaan antara bulan September dan Desember 2023. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner tertulis yang diberikan kepada responden baik secara langsung, melalui surat, maupun secara elektronik. Populasi penelitian terdiri dari 100 pengelola BUMDes, dengan sampel sebanyak 85 responden yang diambil menggunakan metode simple random sampling.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Kompetensi SDM (X1), Whistleblowing (X2), Ketaatan Pelaporan Keuangan (X3), dan Sistem Pengendalian Internal (X4). Variabel moderasi adalah Moral Sensitivity (Z), dan variabel dependen adalah Niat untuk melakukan fraud (Y). Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala likert ordinal. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas data. Setelah itu, analisis regresi linear dilakukan dengan memenuhi asumsi klasik.

Analisis regresi yang dimoderasi, juga dikenal sebagai MRA (Moderated Regression Analysis), digunakan dalam penelitian ini. Dalam bentuk model persamaan, analisis regresi yang dimoderasi dapat direpresentasikan dengan persamaan

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_1Z + e,$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_2Z + e,$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_3Z + e,$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_4Z + e.$$

Variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X1, X2, X3, X4) dan variabel moderasi (Z).

Uji F digunakan untuk memeriksa apakah seluruh variabel independen secara kolektif mempengaruhi variabel dependen. Analisis regresi berganda digunakan untuk memperkirakan nilai variabel dependen (Y) dari data variabel independen (X1, X2, X3, X4).

Dalam konteks penelitian ini, variabel dependen (Y) adalah Niat untuk melakukan fraud. Variabel independen (X1, X2, X3, X4) meliputi Kompetensi SDM, Whistleblowing, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal. Error (e) merupakan nilai residu dalam model regresi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang telah disebutkan dan menguji hipotesis yang terdapat dalam model regresi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pengujian hipotesis, pengujian asumsi klasik telah dilakukan sehingga estimasi OLS dapat diterapkan.

**Tabel 1: Pengaruh Independen Terhadap Pencegahan Fraud**  
Linear regression

Dependen: Pencegahan Fraud	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
Kompetensi SDM	.12	.057	2.12	.037	.007	.233	**
Whistleblowing	.308	.156	1.97	.052	-.003	.618	*
Ketaatan Pelaporan Keuangan	.432	.166	2.60	.011	.102	.762	**
Sistem Pengendalian Internal	-.194	.174	-1.11	.269	-.54	.153	
Constant	7.765	2.115	3.67	0	3.557	11.973	***
Mean dependent var		21.788	SD dependent var		2.837		
R-squared		0.459	Number of obs		85		
F-test		16.971	Prob > F		0.000		
Akaike crit. (AIC)		375.270	Bayesian crit. (BIC)		387.483		

\*\*\*  $p < .01$ , \*\*  $p < .05$ , \*  $p < .1$

Uji pengaruh menunjukkan hasil analisis regresi linear terhadap variabel dependen "Pencegahan Fraud" dan variabel independen, yaitu "Kompetensi SDM," "Whistleblowing," "Ketaatan Pelaporan Keuangan," dan "Sistem Pengendalian Internal." Hasilnya adalah sebagai berikut: Kompetensi SDM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dengan peningkatan 0.12 satuan dalam variabel Kompetensi SDM berhubungan dengan peningkatan 0.12 satuan dalam Pencegahan Fraud. *Whistleblowing* tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan Pencegahan Fraud. Ketaatan Pelaporan Keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dengan peningkatan 0.432 satuan dalam variabel Ketaatan Pelaporan Keuangan berhubungan dengan peningkatan 0.432 satuan dalam Pencegahan Fraud. Namun, Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan Pencegahan Fraud. Selain itu, nilai R-squared sebesar 0.459 menunjukkan bahwa sekitar 45.9% variasi dalam Pencegahan Fraud dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut.

### Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Pencegahan Fraud

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laksmi & Sujana (2019), Widyawati et al. (2019), yang semuanya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan substansial terhadap pencegahan fraud. Dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mencegah penyelewengan dan mencapai tujuan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Kemampuan analisis yang baik, kesadaran terhadap prosedur dan kepatuhan, serta kemampuan untuk menciptakan budaya etika yang kuat, semuanya merupakan atribut dari sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu,

pelatihan dan pembinaan perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat desa dalam mengelola keuangan dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

**Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Pencegahan Fraud**

Whistleblowing memiliki potensi untuk mencegah fraud, tetapi dalam praktiknya, ada beberapa faktor yang mengurangi efektivitasnya. Pertama, keterbatasan informasi menjadi hambatan utama karena tidak semua orang memiliki pemahaman penuh tentang proses bisnis atau akses ke informasi yang relevan. Selain itu, ketakutan dan ketidakpercayaan juga memainkan peran penting, karena whistleblower sering menghadapi dilema moral dan risiko pribadi. Whistleblower seringkali mendapat balas dendam karena melapor (Naufal et al., 2020). Mereka takut akan balas dendam atau pembalasan negatif, serta meragukan apakah tindakan mereka akan diambil serius atau menghasilkan perubahan signifikan. Perlindungan hukum yang lemah dan kehilangan bukti juga dapat menghambat whistleblowing. Selain itu, budaya organisasi yang tidak mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas juga mengurangi efektivitas whistleblowing. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan dukungan sistemik dan budaya organisasi yang kuat, perlindungan hukum yang memadai, serta mekanisme penyelidikan dan tindakan yang responsif.

**Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud**

Ketaatan pelaporan keuangan yang baik memiliki hubungan positif dengan upaya pencegahan fraud. Ketaatan pelaporan keuangan mencerminkan integritas dan kepatuhan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pemerintahan, pengelolaan keuangan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, tertib dan disiplin anggaran, serta pemisahan tanggung jawab dan pengawasan yang efektif dapat mencegah kecurangan dan kesalahan material dalam laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam pelaporan keuangan mengurangi peluang terjadinya kecurangan, sementara pengawasan internal yang kuat memungkinkan deteksi dan pencegahan fraud. Identifikasi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan juga memicu penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, ketaatan pelaporan keuangan yang baik memiliki efek deterrensi dan jera terhadap pelaku fraud potensial. Secara keseluruhan, ketaatan pelaporan keuangan yang baik dan efektif menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pelaku fraud. Melalui transparansi, pengawasan yang baik, identifikasi ketidaksesuaian, dan efek deterrensi, ketaatan pelaporan keuangan menjadi alat yang efektif dalam mencegah fraud di dalam organisasi.

**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud**

Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan fraud tidak signifikan. Faktor-faktor seperti kelemahan desain, kurangnya kepatuhan pelaksanaan, kolusi, kemampuan pelaku untuk menghindari atau memanipulasi sistem, serta kurangnya penyesuaian dengan perubahan lingkungan dan teknologi dapat mengurangi efektivitas sistem dalam mencegah terjadinya fraud. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi dan pemeliharaan sistem pengendalian internal agar dapat lebih efektif dalam mencegah fraud.

**Tabel 2: RMA - Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Pencegahan Fraud**

Dependen: Pencegahan Fraud	(1)	(2)	(3)
	$Y \sim a + b1x1$	$Y \sim a + b1x1 + b2z$	$Y \sim a + b1x1 + b2z + b3x1z$
Kompetensi SDM	.281*** (.044)	.178*** (.044)	.083 (.376)
Moral Sensitivity		.614*** (.125)	.383 (.923)
Kompetensi SDM x Moral Sensitivity			.004 (.017)
_cons	8.271*** (2.112)	-.182 (2.537)	4.933 (20.343)
Observations	85	85	85

R-squared	.334	.486	.486
Adj R <sup>2</sup>	.326	.473	.467
F-stat	41.561	38.708	25.532

*Standard errors are in parentheses*

\*\*\*  $p < .01$ , \*\*  $p < .05$ , \*  $p < .1$

Dalam analisis regresi moderasi ini, terdapat tiga model yang dievaluasi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Pencegahan Fraud. Pada Model (1), variabel Kompetensi SDM secara signifikan mempengaruhi Pencegahan Fraud. Pada Model (2), penambahan variabel Moral Sensitivity bersama dengan Kompetensi SDM juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud. Namun, pada Model (3), interaksi antara Kompetensi SDM dan Moral Sensitivity tidak terbukti signifikan. Model (1) menjelaskan sekitar 33.4% variasi dalam Pencegahan Fraud, sementara Model (2) dan (3) mampu menjelaskan sekitar 48.6% variasi dalam Pencegahan Fraud. Interpretasi yang serupa dapat diterapkan pada tabel selanjutnya.

### **Pengaruh SDM terhadap Pencegahan Fraud yang Dimoderasi Moral Sensitivity**

Temuan ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) dan Moral Sensitivity memiliki hubungan yang independen dengan pencegahan fraud. Namun, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan adanya efek moderasi antara kedua variabel tersebut. Penelitian sebelumnya juga mendukung temuan ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel, kompetensi dan moralitas, secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud secara independen. Namun, moralitas memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan kompetensi SDM. Ketika variabel yang lebih dominan dimasukkan ke dalam model, variabel lain cenderung melemah. Selain itu, moralitas yang rendah dapat membuat seseorang merasa bahwa melakukan kecurangan adalah hal yang wajar.

**Tabel 3: RMA - Pengaruh Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud**

Dependen: Pencegahan Fraud	(1)	(2)	(3)
	$Y \sim a + b1x2$	$Y \sim a + b1x2 + b2z$	$Y \sim a + b1x2 + b2z + b3x2z$
Whistleblowing	.721*** (.111)	.489*** (.105)	1.818** (.862)
Moral Sensitivity		.633*** (.117)	1.624** (.648)
Whistleblowing x Moral Sensitivity			-.058 (.038)
_cons	11.164*** (1.65)	.768 (2.395)	-21.535 (14.546)
Observations	85	85	85
R-squared	.338	.512	.526
Adj R <sup>2</sup>	.33	.5	.509
F-stat	42.424	43.016	29.977

*Standard errors are in parentheses*

\*\*\*  $p < .01$ , \*\*  $p < .05$ , \*  $p < .1$

### **Pengaruh Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud yang Dimoderasi Moral Sensitivity**

Analisis ini menunjukkan bahwa Whistleblowing (pelaporan pelanggaran) dan Moral Sensitivity memiliki hubungan yang independen dengan Pencegahan Fraud. Namun, belum ada cukup bukti untuk menyimpulkan adanya efek moderasi antara kedua variabel tersebut dalam konteks Pencegahan Fraud. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan hasil yang serupa, lihat (Bernardin & Solihat, 2019) dan (Biduri et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan fraud. Whistleblowing lebih terkait dengan integritas dan keberanian individu untuk melaporkan pelanggaran, daripada moralitas mereka. Seseorang cenderung

melaporkan pelanggaran berdasarkan nilai-nilai profesionalisme dan tanggung jawab, bukan semata-mata karena moralitas mereka.

**Tabel 4: RMA - Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud**

Dependen: Pencegahan Fraud	(1)	(2)	(3)
	$Y \sim a + b1x3$	$Y \sim a + b1x3 + b2z$	$Y \sim a + b1x3 + b2z + b3x3z$
Ketaatan Pelaporan Keuangan	.713*** (.099)	.491*** (.098)	.468 (.89)
Moral Sensitivity		.588*** (.118)	.57 (.729)
Ketaatan Pelaporan Keuangan x Moral Sensitivity			.001 (.04)
_cons	10.837*** (1.544)	1.397 (2.332)	1.801 (15.871)
Observations	85	85	85
R-squared	.383	.527	.527
Adj R <sup>2</sup>	.376	.515	.509
F-stat	51.584	45.637	30.054

*Standard errors are in parentheses*

\*\*\*  $p < .01$ , \*\*  $p < .05$ , \*  $p < .1$

Hasil analisis menunjukkan bahwa Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Moral Sensitivity memiliki hubungan yang independen dengan Pencegahan Fraud. Namun, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan adanya efek moderasi antara kedua variabel tersebut dalam konteks Pencegahan Fraud. Temuan ini mendukung temuan (Wonar et al., 2018), yang menunjukkan bahwa Moral tidak memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud. Ketaatan pelaporan keuangan lebih terkait dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan dan badan pengawas. Keputusan untuk melaporkan keuangan dengan benar atau mengungkap kecurangan lebih didasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab hukum yang diatur oleh sistem kelembagaan, bukan semata-mata moralitas individu. Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki moralitas yang tinggi, mereka tidak memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud jika tidak ada hukuman atau konsekuensi yang signifikan untuk tidak melaporkan. Faktor psikologis seperti tekanan kelompok atau takut menjadi outlier juga dapat mempengaruhi ketaatan pelaporan keuangan. Individu mungkin merasa terintimidasi atau takut melaporkan kecurangan jika mereka berada dalam kelompok yang tidak mendukung atau jika mereka merasa tindakan mereka akan berdampak negatif pada hubungan atau reputasi mereka. Faktor psikologis ini dapat mengurangi pengaruh moralitas dalam memoderasi ketaatan pelaporan keuangan.

**Tabel 5: RMA - Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud**

Dependen: Pencegahan Fraud	(1)	(2)	(3)
	$Y \sim a + b1x4$	$Y \sim a + b1x4 + b2z$	$Y \sim a + b1x4 + b2z + b3x4z$
Sistem Pengendalian Internal	.607*** (.138)	.355*** (.123)	2.152** (1.007)
Moral Sensitivity		.737*** (.122)	1.899*** (.657)
Sistem Pengendalian Internal x Moral Sensitivity			-.072* (.04)
_cons	12.62*** (2.107)	.323 (2.686)	-28.26* (16.127)
Observations	85	85	85
R-squared	.188	.44	.461
Adj R <sup>2</sup>	.179	.426	.441

F-stat	19.261	32.167	23.104
--------	--------	--------	--------

*Standard errors are in parentheses*

\*\*\*  $p < .01$ , \*\*  $p < .05$ , \*  $p < .1$

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik dan tingkat sensitivitas moral memiliki hubungan yang independen dengan Pencegahan Fraud yang lebih tinggi. Namun, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan adanya efek moderasi dari interaksi antara Sistem Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity dalam konteks Pencegahan Fraud. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan hasil yang serupa (lihat (Wonar, 2018)). Sistem pengendalian internal bertujuan untuk mengelola risiko dan mencegah kecurangan melalui kebijakan, prosedur, dan pengawasan yang ketat. Pengaruh sistem pengendalian internal lebih terkait dengan efektivitas dan efisiensi dalam mengendalikan risiko daripada aspek moral individu. Oleh karena itu, moral sensitivitas memiliki pengaruh yang terbatas dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap Pencegahan Fraud. Sistem pengendalian internal lebih berfokus pada penerapan prosedur dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, serta pemisahan tugas yang tepat. Moral sensitivitas, meskipun penting, bukanlah faktor utama dalam menentukan efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah fraud, karena melibatkan aspek moral individu yang kompleks dan bervariasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diambil. Pertama, kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, pengelola BUMDes dapat lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi tindakan fraud. Sebagai contoh, pemahaman yang baik tentang sistem akuntansi dan kontrol internal dapat membantu mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme whistleblowing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud di BUMDes. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan karyawan terhadap sistem whistleblowing, kurangnya perlindungan bagi pelapor, atau ketidaktahuan karyawan tentang mekanisme ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penguatan terhadap sistem whistleblowing. Hal ini meliputi meningkatkan kepercayaan karyawan dengan menjamin anonimitas dan keamanan bagi pelapor, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya whistleblowing, dan menetapkan prosedur tindak lanjut yang jelas dan transparan terhadap laporan whistleblowing. Selanjutnya, terdapat hubungan yang signifikan antara ketaatan pelaporan keuangan dan pencegahan fraud. Ketaatan pelaporan keuangan berperan penting dalam mendorong pencegahan fraud pengelola BUMDes. Namun, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan fraud. Sistem pengendalian internal tidak mampu mendorong individu untuk mencegah fraud pengelola BUMDes. Selain itu, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara interaksi kompetensi SDM dan moral sensitivity, whistleblowing dan moral sensitivity, ketaatan pelaporan keuangan dan moral sensitivity, serta sistem pengendalian internal dan moral sensitivity terhadap pencegahan fraud. Moral sensitivity tidak mampu memoderasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pencegahan fraud pengelola BUMDes.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran untuk mencegah fraud di BUMDes adalah meningkatkan pemahaman tentang praktik bisnis yang etis melalui pelatihan dan pengembangan, memperkuat pengawasan internal dengan pemeriksaan rutin dan langkah-langkah pengendalian yang ketat, mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui kebijakan yang jelas, memperkuat sistem whistleblowing yang efektif dan aman, memperkuat sistem

pengendalian internal dengan evaluasi yang menyeluruh, membangun budaya integritas melalui pelatihan etika dan komunikasi nilai perusahaan, meningkatkan pengawasan eksternal dengan melibatkan pihak independen, serta mendorong kolaborasi dan pertukaran informasi dengan organisasi serupa untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pencegahan fraud. Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sampel yang terbatas dan kurangnya data longitudinal yang dapat memberikan gambaran jangka panjang tentang efektivitas langkah-langkah yang disarankan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan desain studi yang lebih komprehensif untuk mengkonfirmasi temuan ini dan mengembangkan strategi pencegahan fraud yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61–70.
- Bernardin, D. E. Y., & Solihat, I. (2019). Internal whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi. *Jurnal Sains Manajemen*, 1(1), 108–120.
- Biduri, S., Ferisanti, R. A., & Hermawan, S. (2023). Pencegahan Kecurangan di Pemerintah Desa melalui Moralitas Individual. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2).
- Biduri, S., Fitriyah, H., & Febriana, P. (2022). Pencegahan Fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4021–4036.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Fitriska, K. (2017). Strategi pengembangan badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 29–34.
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105–114.
- Iskandar, J., Sakti, F. T., Azzahra, N., Nabila, N., & others. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11.
- Jaya, R., & Rafi, M. (2018). Analisis Hambatan dalam Pengembangan BUM Desa Studi Kampung Rempak Kabupaten Siak. *Jurnal El-Riyasah*, 9(1).
- Karyono, K. (2003). Fraud Auditing. *The Winners*, 3(2), 150–160.
- Khoirunisa, N. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes di

- Wilayah Kecamatan Karangrejo. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 183–194.
- Krisiandi, K. (2020). *Wapres: Pemberdayaan Desa Disesuaikan Karakteristik Budaya Warga*, KOMPAS.com. KOMPAS.  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/08/10364501/wapres-pemberdayaan-desadisesuaikan-karakteristik-budaya-warga>
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Accounting Department, Economic and Business Faculty of Universitas Udayana in Collaboration with the Association of Accounting Department of Indonesia, Bali Region, Vol 26 No.*
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh*. Muhammadiyah University Yogyakarta.
- Naufal, M., Sofia, A., Prawira, I. F. A., & Apandi, R. N. N. (2020). Whistleblower dilemma: Individual and situational factors in whistleblowing intention. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(12), 43–60.
- Oktaviani, I. A. A., Herawati, N. T., Ak, S. E., Atmadja, A. T., & others. (2017). Pengaruh Paktik Akuntabilitas, Conflict Of Interest dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi forensik dan audit investigatif. *Jakarta: Salemba Empat*, 431.
- Widyawati, A., Sujana, E., & Yuniarta, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(3), 368–379.
- Wijanarko, A. S. (2012). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moral Sensitivity sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63–89.